



Buletin Parlementaria

Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021



DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-AS di Berbagai Bidang



3 Puan Maharani
Harap Jenderal
Andika Bawa TNI
Semakin Profesional



5 Rachmat Gobel:
Pemda Harus Cari
Solusi Atasi Banjir
Gorontalo



9 772614 339005



BULETIN

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-AS di Berbagai Bidang



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menerima kunjungan Ketua Subkomite Parlemen AS Ami Bera. Foto: Gerald/Man

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus menerima kunjungan Anggota Parlemen Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk penanganan Covid-19.

"Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Amerika Serikat di

berbagai bidang untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara," ujar Lodewijk saat menerima Kunjungan Ketua Subkomite Parlemen AS untuk Asia Pasifik Ami Bera di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Jumat (12/11).

Dalam kunjungan tersebut, Ami Bera didampingi oleh pejabat parlemen, diantaranya Anggota Kongres Perwakilan California Juan Vargas, Anggota Kongres Perwakilan Virginia Abigail Spanberger

dan Anggota Kongres Perwakilan Washington Derek Kilmer.

Lodewijk menyampaikan terima kasih atas bantuan yang sebelumnya diberikan Amerika terhadap Indonesia. "Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas bantuannya kepada Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19, seperti vaksin, ventilator, dan obat-obatan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, AS memberikan bantuan sebesar 30 juta dolar AS yang terdiri dari peralatan oksigen, peralatan medis dan obat-obatan. Amerika juga memberikan bantuan vaksis dosis Moderna melalui Fasilitas Covax dengan total sekitar 12 juta dosis yang tiba di Jakarta pada 1 Agustus lalu. Dengan ini total bantuan yang diberikan Amerika sebesar 65 juta dolar AS sejak awal pandemi.

Lodewijk mengatakan jika Indonesia menyambut baik dukungan yang diberikan negara-negara sahabat terkhusus Amerika. Tidak hanya bantuan dalam menangani pandemi Covid, namun juga dukungan dalam pemulihan ekonomi di berbagai aspek.

"Indonesia juga terbuka terhadap kerja sama konkret untuk implementasi *ASEAN Outlook on The Indo-Pacific* yang terfokus pada empat prioritas. Yakni kerja sama maritim, konektivitas, *Sustainable Development Goals*, serta perdagangan dan investasi," tambah Lodewijk.

Dalam kesempatan yang sama, Ami Bera menyampaikan Amerika ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk penyediaan vaksin Covid-19. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang dinilai telah berhasil menangani pandemi Covid-19.

"Kedua negara kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dalam menghadapi pandemi. Namun, seiring dengan kita memasuki fase selanjutnya dari pandemi ini kita harus bekerja bersama-sama dengan lebih erat," jelas Ami Bera lebih lanjut. ■ [ami,dty,ann/es](#)



Puan Maharani Harap Jenderal Andika Bawa TNI Semakin Profesional



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Foto: Kresno/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengucapkan selamat atas pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Presiden Joko Widodo. Puan berharap, Jenderal Andika dapat membawa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin maju dan profesional pengabdianannya untuk negara.

“Selamat atas dilantikannya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Semoga bisa membawa TNI semakin profesional dan terus dekat dengan rakyat. Tegakkan kedaulatan NKRI, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan,” ungkap Puan dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Rabu (17/11).

Pelantikan Jenderal Andika oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/11). Andika dilantik setelah mendapatkan persetujuan menjadi Panglima TNI dari DPR RI. Persetujuan itu disahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 pada 8 November 2021.

Jenderal Andika menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021. Puan pun berterima kasih atas kinerja Hadi selama memimpin TNI sejak periode pertama Presiden Jokowi.

“Apresiasi yang tinggi saya ucapkan secara khusus kepada Marsekal Hadi Tjahjanto atas pengabdianannya selama memimpin TNI. Keberhasilan dan prestasi TNI selama ini tidak terlepas dari kinerja Marsekal Hadi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. ■ *ann/sf*



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Sufmi Dasco Ucapkan Selamat atas Pelantikan KSAD yang Baru



KAMI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS KEPADA KSAD YANG BARU DAN SEMOGA ANGKATAN DARAT DI BAWAH KEPEMIMPINAN PAK DUDUNG TETAP MAJU DALAM BINGKAI NKRI MENJAGA KEUTUHAN NEGARA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan ucapan selamat kepada Letjen Dudung Abdurahman yang dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11). Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini berharap Dudung dapat membawa TNI AD semakin maju dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami ucapkan selamat bertugas kepada KSAD yang baru dan semoga Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Pak Dudung tetap maju dalam bingkai NKRI menjaga keutuhan negara,” kata Dasco ketika ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11).

Dasco meyakini, Dudung merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu. Sebab, menurutnya, nama-nama yang diusulkan sejauh ini merupakan sosok yang pantas menduduki jabatan KSAD. Beberapa nama yang sempat beredar selain Dudung, di antaranya adalah Letjend Eko Margiyono (Kasum TNI), Letjend Joni Supriyanto (Kepala BAIS TNI), dan Letjend Bakti Agus Fadjar (Wakasad TNI).

“Kalau kita lihat beberapa calon yang kemarin beredar namanya, itu semua memenuhi kualifikasi yang cukup pantas

untuk menduduki jabatan KSAD. Namun itu berpulang pada kewenangan Presiden untuk mengangkat KSAD yang baru,” tambah Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Dasco berharap dengan adanya KSAD yang baru ini, antara DPR RI dan TNI dapat bekerja sama dengan baik. “Serta, tentunya TNI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI,” pesan legislator

dapii Banten III itu.

Diketahui, sebelum menerima amanah sebagai KSAD, beberapa posisi yang pernah dijabat Dudung Abdurahman adalah sebagai Pangkostrad pada 2021, Pangdam Jayakarta pada 2020-2021, Gubernur Akmil pada 2018-2020, dan Wakil Asisten Teritorial KSAD pada 2017-2018. Selain melantik Dudung Abdurahman, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru. ■ rdn/sf

Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/nvl





Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Foto: Rifky/Man

Rachmat Gobel: Pemda Harus Cari Solusi Atasi Banjir Gorontalo

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus cepat turun tangan menyelesaikan masalah banjir yang terjadi di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Menurutnya daerah tersebut sudah sering terdampak banjir tetapi belum ada solusi konkret untuk memitigasi bencana alam yang kerap terjadi setiap musim penghujan.

“Desa Datahu merupakan wilayah yang selalu menjadi langganan banjir di setiap tahun, berharap ada solusi dari Pemerintah Daerah Gorontalo

terkait untuk mengatasi banjir di daerah tersebut,” ucap Gobel dalam keterangan persnya, Jumat (12/11).

Desa Datahu merupakan salah satu desa yang mengalami dampak terparah akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gorontalo beberapa hari yang lalu. Tercatat, sebanyak 778 unit rumah warga rusak dan 1.041 kepala keluarga terdampak.

Kepada masyarakat yang terdampak, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menyerahkan bantuan berupa kasur, selimut, dan sembako kepada korban banjir di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Di sisi lain, Gobel mengingatkan betapa pentingnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membangun kelembagaan yang kuat. “Melalui dua penguatan itu, maka masyarakat juga memiliki kemampuan swadaya dan memiliki kemandirian,” ucap politisi Partai Nasdem tersebut.

Untuk itu, Gobel mengajak masyarakat memperkuat sektor pertanian, koperasi, dan UMKM yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. “Kita akan bekerja bersama-sama. Masyarakat yang kuat dan sejahtera merupakan solusi yang sesungguhnya,” komitmen Gobel. ■ azk/es

Digitalisasi Penyiaran Harus Bisa Bantu Masyarakat Dapatkan Informasi

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid mengatakan bahwa dalam rangka kesiapan digitalisasi penyiaran publik di Sumatera Utara nantinya akan ada *Analog Switch Off (ASO)*, maka keberadaan LPP seperti TVRI dan RRI dalam menuju digitalisasi penyiaran tersebut haruslah bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi.

“Masyarakatnya sudah siap atau belum, dan yang tidak mampu untuk membeli *Set Top Box*? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau belum, ini yang kami tanyakan,” kata Meutya usai memimpin Kunjungan



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid saat memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Medan. Foto: Chasbi/Man

Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/11).

Perlu diketahui, ASO mulai dilaksanakan paling lambat 31 Maret

Komisi I Serap Masukan Lembaga Penyiaran Lokal di Jawa Timur

Komisi I DPR RI terus menggali masukan dari lembaga penyiaran lokal dan pihak terkait lainnya dalam rangka memperkuat informasi dan data pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Untuk itu, Tim Komisi I DPR RI dipimpin Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendatangi lembaga penyiaran lokal di Jawa Timur.



Komisi I DPR RI saat bertukar cenderamata usai pertemuan di Kantor TVRI Jawa Timur. Foto: Agung/Man

“Data, informasi dan masukan kami peroleh dari kunjungan ke Jawa Timur ini untuk menjadi bahan pembahasan RUU penyiaran,” ujar Nurul di Kantor TVRI Jawa Timur, Surabaya, Jumat (12/11). Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan TVRI dan RRI

Jawa Timur, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur serta lembaga penyiaran swasta lokal.

Menurut Nurul, tantangan *multiplatform* menjadikan eksistensi RUU Penyiaran menjadi sangat penting untuk dibahas terutama terkait

2022 untuk daerah layanan Karo, Simalungun, Asahan, Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Batubara. Kemudian pada 17 Agustus 2022 untuk daerah layanan Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. Dengan data tersebut, maka dipastikan pada 18 Agustus 2022 secara efektif pemancar TVRI Sumut sudah *full digital*.

“Nampaknya PR-nya masih banyak, di antaranya bagaimana *Set Top Box* bisa disebarluaskan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Jadi untuk mengejar nanti di tahun 2022 tepatnya di bulan April, untuk melakukan *switch* dari analog ke digital itu masih banyak PR untuk Sumatera Utara,” tambah Meutya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, jangan sampai di tengah kondisi pandemi saat ini yang mana informasi menjadi sangat penting tetapi tidak bisa diakses. “Karena jika nanti televisinya bukan digital, kemudian sudah adanya digitalisasi, mereka nanti tidak bisa menonton televisi, jadi memang harus dibantu bagi masyarakat yang tidak mampu,” kritisi legislator dapil Sumut I itu. ■ cas/sf

dengan permasalahan lain yang tidak dapat dipungkiri, yaitu keberadaan penyiaran yang dilakukan di berbagai media. “Penyiaran di berbagai media ini yang disebut dengan penyiaran *multiplatform* atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terang Nurul.

Untuk itulah, kata Nurul, Komisi I DPR RI perlu merancang UU tentang Penyiaran yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan keberagaman informasi mengingat RUU Penyiaran dapat mendorong tersedianya berbagai konten berita yang diterima masyarakat. “Sebab kami menginginkan konten penyiaran yang lebih variatif, lebih banyak pemilik stasiun televisi, *diversity of content and diversity of ownership*,” tukas politisi Partai Golkar itu. ■ ah/sf

Komisi I Jaring Masukan RUU Penyiaran di Bali

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono menyampaikan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran akan disiapkan untuk mendukung implementasi TV digital. Karenanya, Komisi I DPR RI menjaring masukan dari berbagai *stakeholder* untuk mendapatkan data dan aspirasi terkait RUU Penyiaran.

Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Tentang Penggantian atas UU tentang Penyiaran dengan tema “Tantangan Penyiaran *Multiplatform* di Indonesia”, di Bali, Kamis (11/11). Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan LPP TVRI Bali, RRI Denpasar, KPID Bali, dan *stakeholder* lainnya.

Anton menyampaikan RUU tentang Penyiaran diharapkan juga dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan keberagaman informasi. Mengingat RUU tentang Penyiaran dapat mendorong tersedianya berbagai konten berita yang diterima masyarakat.

Wakil Ketua
Komisi I DPR RI
Anton Sukartono.
Foto: Anne/Man

”

RUU TENTANG PENYIARAN DIHARAPKAN JUGA DAPAT MEMBANTU MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN KEBERAGAMAN INFORMASI

“Pada prinsipnya, DPR RI menginginkan konten penyiaran yang lebih variatif, lebih banyak pemilik stasiun televisi, *diversity of content and diversity of ownership*. Hal ini bertujuan agar keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi bagi pemirsa dapat menjadi referensi

tayangan yang lebih kaya dan lebih berkualitas lagi,” harap politisi Partai Demokrat itu.

■ ann/sf



Komisi II: Awasi Keamanan Jaringan Internet dan Server Seleksi CPNS 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2021 ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh oknum dengan menggunakan modus *remote access*. Modus tersebut memungkinkan seseorang di lokasi berbeda, mengakses komputer yang digunakan peserta tes CPNS saat tes berlangsung. Untuk itu, ketersediaan jaringan internet, dan keamanan server harus betul-betul diawasi oleh seluruh panitia.

“Ada orang membantu peserta untuk menyelesaikan soal-soal ujian SKD, sehingga pelaku kecurangan dapat mengatur bank soal yang merupakan tempat kumpulan soal-soal agar dapat mengerjakan soal dengan cepat, mudah, dan benar jawabannya,”



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Arief/Man

ujar Saan Mustopa saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanreg III BKN Bandung, BKD Jabar beserta jajarannya, guna membahas evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/11).

Politisi Partai NasDem ini menilai, pemerintah belum optimal dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi keamanan data pada sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN. Ini menjadi catatan untuk pemerintah, tim pengamanan teknologi, dan tim *quality assurance* agar server CAT BKN tidak dapat diretas.

“Pemerintah harus meningkatkan sistem keamanan server CAT BKN

serta berbagai upaya antisipasi agar kecurangan dalam bentuk apapun tidak dapat terjadi. Mengingat tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 masih berlanjut dan pengawasan akan dilakukan hingga tahap akhir selesai,” tutur legislator dapil Jabar VII itu. ■ afr/es

Komisi II Ingin SKB CPNS 2021 Jauh dari Kecurangan

Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2021 dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, di beberapa titik lokasi, diwarnai sejumlah kecurangan. Dimana, sistem keamanan yang diklaim aman oleh Badan Kepegawaian Negara

(BKN), ternyata masih bisa dibobol oleh oknum dengan menggunakan aplikasi berbasis *remote access*.

Tak ingin kejadian serupa terulang, Komisi II DPR RI merasa perlu memastikan keamanan sistem dan teknologi yang kelak akan digunakan di tahapan berikutnya atau seleksi kompetensi bidang (SKB).

“Ini akan menjadi kontrol kita (Komisi II) secara serius karena berkaitan dengan terjadinya kecurangan-kecurangan yang sangat memalukan yang baru-baru ini melibatkan 225 CPNS yang mengikuti tes SKD,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai memimpin pertemuan Komisi II DPR RI dengan jajaran Kantor Regional II BKN Surabaya, yang juga dihadiri oleh BKD Jawa Timur, di Surabaya, Jatim, Selasa (16/11).

Sebagai upaya mengungkap penyebab kecurangan tersebut, Syamsurizal mengungkapkan, Komisi II sudah melakukan kajian-kajian serta sudah meminta penjelasan dari

Komisi II Apresiasi BKN Temukan Kecurangan dalam Seleksi CASN di Makassar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) IV Makassar yang telah menemukan kecurangan beserta bukti-buktinya dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 yang diselenggarakan di wilayah BKN Kanreg IV Makassar.

Hal tersebut disampaikan Luqman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II dengan Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Imran Jausi, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Agus Sutiadi beserta jajaran guna melakukan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021 di wilayah Kanreg IV BKN Makassar, Sulsel, Selasa (16/11).

“Sungguh (temuan permasalahan CASN) harus kita manfaatkan sebagai pintu untuk memperbaiki sistem, aturan main, standar operasional dan prosedur ke depan agar mekanisme rekrutmen calon ASN yang selama ini

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Bianca/nvl



Kementerian PAN-RB serta BKN. Dirinya merasa heran, mengapa pengerjaan soal masih bisa dilakukan dari luar perangkat tes, padahal sebelumnya teknologi yang digunakan sudah diklaim aman.

“Jadi ini yang kita ingin lakukan yaitu kontrol. Karena kita merasa punya tanggung jawab dalam hal penerimaan CPNS, untuk mendapatkan CPNS yang berkualitas ke depan. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar kita memiliki CPNS yang berkelas dunia. Namun, harapan kita menjadi buyar karena kecurangan seperti ini,” tutur politisi PPP tersebut. ■ es

sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui sistem berbasis komputer ini bisa kita pulihkan kembali,” ujar Luqman.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi CASN lebih disebabkan adanya pihak-pihak yang diduga kuat melibatkan jaringan orang dalam. “Terjadinya kecurangan itu adanya *insider* atau pihak-pihak jahat yang diduga kuat melibatkan jaringan dalam. Jadi bukan serangan *hacker* dengan kecanggihan atau penguasaan IT tertentu,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VI tersebut. ■ bia/sf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Erman/Man



Komisi IV Dorong Perusahaan dan Pemerintah Berpihak pada Petani Sawit

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Panitia Kerja (Panja)

Pengembangan Sawit Rakyat Komisi IV DPR RI mengunjungi perkebunan sawit di Kabupaten Siak, Riau.

Dedi mendorong perusahaan dan pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani sawit. Setelah berdialog dengan Bupati Siak dan petani sawit, Dedi mendorong perusahaan membuka ruang agar petani diberi kesempatan melakukan ekonomi produksi selama masa tunggu panen sawit.

“Mendorong perusahaan agar membuat ruang, membuka ruang agar petani selama nunggu proses sawitnya berbuah, itu rentangnya panjang 1-5 tahun, itu mereka bisa melakukan ekonomi produksi menggunakan area tanah perkebunan,” papar Dedi saat meninjau area perkebunan sawit di Siak, Riau, Kamis (11/11).

Dedi menjelaskan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian, tidak menjadi problem jika area sawit ditanami jagung, umbi, dan tanaman lain selama *recommended* dari Badan Litbang, sehingga petani tidak harus menunggu hasil panen sawit. Pasalnya rentan waktu tunggu bisa berlangsung tahunan dan itu menjadi waktu kosong tanpa pemasukan bagi petani sawit.

Persoalan lain yang diadukan petani terkait dengan harga pupuk yang masih belum terjangkau oleh petani. Antara harga pupuk dengan harga buah sawit tidak sepadan. Sehingga politisi Partai Golkar itu



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau area perkebunan sawit di Siak. Foto: Eko/Man

mendorong agar pemerintah segera mencari solusi terkait masalah pupuk yang tak kunjung usai. “Harus didorong juga terutama Pupuk Indonesia, segera juga agar harga

pupuknya jangan terlalu tinggi, agar petani memiliki kecukupan pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi,” tukasnya. ■ eko/sf

Pelayanan Terhadap Petani Harus Optimal

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mengatakan tujuan Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja)

tentang Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani adalah untuk mengevaluasi aturan seperti apa yang seharusnya dibuat agar pelayanan dari pemerintah terhadap petani dapat lebih optimal.

“Kita ini kan lagi membuat Panja Pupuk. Makanya (saat pertemuan) saya mengatakan, supaya para petani *ngomong* apa adanya. Nanti jawabannya akan kita rapatkan di Panja. Ini tidak ada rekayasa, ini *loh*,” jelas Mindo usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani di KUD Tani

Komisi IV Temukan Banyak Permasalahan Kawasan Hutan di Babel

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, pihaknya menemukan banyak permasalahan yang sangat rumit terkait lahan-lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan, namun digunakan untuk pertambangan dan tambak secara ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Anggia, seharusnya pemakaian kawasan hutan dengan cara yang ramah terhadap lingkungan menjadi kebutuhan masyarakat.

“Itu yang menjadi semangat dari teman-teman Komisi IV untuk melestarikan alam dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat,” tegas Anggia di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penggunaan, Pelepasan dan Pengrusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI meninjau

Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung, di Bangka, Babel, Kamis (11/11).

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan jika kebutuhan pemakaian kawasan hutan yang dilakukan korporasi dan pihak komersial hanya untuk meraup keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Sehingga Anggia mewakili Panja Penggunaan, Pelepasan dan Pengrusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Kalau misalnya yang bergerak adalah korporasi, itu yang kita sedih *banget*. Jadi sudah merusak, ujung-ujungnya hanya (mencari) *benefit*, komersial *aja*. Itu tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kalau kami merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990,



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung. Foto: Aisyah/Man

itu kan justru lebih ke bagaimana melibatkan masyarakat dan kelestarian tetap terjaga. Jadi itu salah satu itu komitmen kita untuk bisa menegakkan, semaksimal mungkin untuk (menerapkan) *punishment*, jadi biar ada efek jera,” tegas Anggia. ■ *ais/sf*



Jaya, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis, (11/11).

Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat berinteraktif dengan para petani di Mojokerto. “Pulang dari sini, minggu

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar. Foto: Hanum/Man



PUKUK BERSUBSIDI DAN KARTU TANI ADALAH UNTUK MENGEVALUASI ATURAN SEPERTI APA YANG SEHARUSNYA DIBUAT AGAR PELAYANAN TERHADAP PETANI DAPAT OPTIMAL

depan kita akan rapat Panja lagi, antara lain data yang didapat dari Mojokerto yang akan dijadikan sebagai materi

rapat. Jadi nanti rekomendasinya agar sungguh-sungguh sesuai dengan harapan masyarakat,” komitmen politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Tim Kunspek Komisi IV DPR RI turut didampingi jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), PT PIHC dan anak Perusahaannya, Bank Himbara, Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian, kelompok tani kecamatan se-Mojokerto, serta distributor dan pengecer pupuk. ■ *hnm/es*

Produksi Aluminium Sangat Bergantung pada Pasokan Listrik



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto bertukar cenderamata dengan direksi PT Inalum. Foto: Husen/nvl

Komisi VII DPR RI mendapati informasi, dibutuhkan 14.000 kWh energi listrik untuk memproduksi satu ton aluminium. Inilah yang terjadi pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Asahan, Sumatera Utara. Pasokan listrik didapat dari dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik Inalum di Kabupaten Toba Samosir, Sumut.

“Sumber air untuk pembangkitan diperoleh sepenuhnya dari pengaliran air Sungai Asahan yang berasal dari Danau Toba. PLTA Siguragura sepenuhnya memperoleh energi penggerak turbin dari pemanfaatan potensi air dari aliran Sungai Asahan. Pengaliran air Danau Toba ke Selat Malaka hanya dapat dilakukan melalui Sungai Asahan,” jelas Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menggelar pertemuan Komisi VII DPR

RI dengan direksi PT Inalum, di Toba Samosir, Sumut, Selasa (16/11).

Lebih lanjut Sugeng mengemukakan, sumber air Sungai

Asahan ditampung di Bendungan Penadah Air Sigura-gura. Bendungan ini berjarak 9 kilometer dari Bendungan Pengatur. Bendungan Penadah Air Siguragura terletak di Desa Simorea. “Kunci produksi aluminium adalah tersedianya sumber daya energi listrik yang murah serta bahan baku alumina. Listrik merupakan komponen penting dalam proses produksi aluminium,” jelas Sugeng.

Belakangan ini, masih kata Sugeng, PT Inalum sedang meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 300 ktpa menjadi 500 ktpa. Dengan adanya kenaikan kapasitas tersebut, dibutuhkan pasokan listrik yang *sustainable* dan terjangkau. Salah satunya dengan melakukan akuisisi PLTA Asahan 1 (PT BDSN) dan 3 (PT PLN). Namun terdapat beberapa kendala. Saat ini, lanjutnya, PLN masih enggan melepas Asahan 3 kepada PT Inalum.

Butuh pertemuan antara kedua belah pihak untuk menemukan *win-win solution* pada permasalahan tersebut. Di hadapan para mitra kerja yang hadir, Sugeng meminta penjelasan dan informasi mengenai peningkatan kapasitas produksi PLTA Siguragura milik PT Inalum. “Kami berharap seluruh permasalahan terkait peningkatan kapasitas produksi PLTA Siguragura PT Inalum (Persero) ini dapat berjalan dan teratasi dengan baik,” tutup politisi Partai NasDem itu. ■ mh/sf

Komisi VII Upayakan Masyarakat Bangkalan Rasakan Manfaat dari Eksplorasi Migas

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menyatakan sebagai representasi masyarakat, DPR RI tidak akan menutup telinga ketika mengetahui ada daerah penghasil minyak dan gas,

salah satunya Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, namun masyarakatnya sendiri tidak menerima manfaat.

“Hari ini kami mencoba melakukan mediasi atas aspirasi dari masyarakat Bangkalan terkait pengelolaan gas oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura

Komisi VII Dorong *Stakeholder* Serious Kembangkan Mobil Listrik

Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dan industri otomotif di Indonesia serius dalam mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik (Electric Vehicle atau EV) di Indonesia, dengan mengembangkan mobil ramah lingkungan seperti mobil yang bertenaga listrik dimana mobil ini tidak menghasilkan emisi karbon tentunya tidak mencemari lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, pengembangan kendaraan listrik termasuk industri baterai sangatlah penting. Hal ini untuk menekan konsumsi dan emisi dari BBM, sehingga dapat menekan impor serta lebih ramah terhadap lingkungan. Sartono mengungkapkan hal itu usai mengikuti Komisi VII DPR RI meninjau pabrik perakitan PT Mercedes-Benz di Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11).

Namun Sartono mengingatkan ketika peralihan ke kendaraan listrik terealisasi, maka dukungan infrastrukturnya harus dipersiapkan.



Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke pabrik perakitan PT Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor. Foto: Andri/nvl

“Karena sampai saat ini belum banyak tersedia fasilitas pengisian baterai dan juga pengurangan emisi karbon. Dengan menghadirkan mobil listrik menjadi tidak efektif, karena sebagian besar pembangkit listrik di negara kita memakai bahan bakar batu bara dan gas alam. Semakin banyak EV yang kita buat, semakin buruk emisi

karbon,” jelas Sartono.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, pabrik perakitan Mercedes-Benz di Gunung Putri ini dinyatakan sebagai produsen otomotif dengan sertifikasi Eco-industri dari TÜV Rheinland. Hal tersebut menjadi bukti pabrik ini juga ramah terhadap lingkungan sekitar. ■ man/sf

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariyadi. Foto: Ria/Man



Offshore (PHE WMO) yang manfaatnya belum dirasakan masyarakat sekitar,” ungkap Haryadi usai memimpin pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan perwakilan PT Pertamina di Kantor Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (16/11).

Untuk itu, pihaknya minta Bupati Bangkalan untuk menyampaikan usulan pemasangan jaringan gas ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar jaringan gas yang merupakan program

strategis nasional dapat teralisasi untuk kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya Direktur BUMD Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Bangkalan oleh PT Pertamina PHE WMO tidak memberi kesejahteraan pada masyarakat bangkalan. “Bangkalan merupakan salah satu wilayah penghasil minyak dan gas. Namun, sampai saat ini nilai manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bangkalan,” ungkap Fauzan. ■ rnm/es

Pembayaran Klaim Covid di RSUD Ulin Banjarmasin Berjalan Baik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan terhadap proses dan pembayaran klaim Covid-19. Pada kesempatan itu, Melki, sapaan akrabnya, mengapresiasi pembayaran klaim terkait Covid-19 di RSUD Ulin Banjarmasin yang relatif berjalan dengan baik.

"Komisi IX DPR mencermati, dalam paparan yang berlangsung, memang pembayaran klaim Covid-19 di RSUD Ulin Banjarmasin ini sudah berjalan dengan baik," ujar Melki dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI jajaran manajemen RSUD Ulin Banjarmasin Banjarmasin, Kalsel, Selasa (16/11).



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri). Foto: Puntho/nvl

Di sisi lain, Melki mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kalsel untuk tetap menjalankan serta mematuhi protokol kesehatan terlebih jelang momen akhir tahun hari raya Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, Melki mengharapkan Kalsel tetap aman dan terkendali dari pandemi Covid-19.

"Komisi IX DPR juga menekankan bahwa tidak lama lagi jelang momen akhir tahun perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Terkait hal itu, maka Komisi IX DPR berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga diharapkan Kalimantan Selatan tetap aman dan terkendali dari Covid-19 dan kondisi tetap stabil seperti saat-saat ini," pungkask politisi Partai Golkar tersebut. ■ pun/sf

Komisi IX Awasi Permasalahan *Dispute* Klaim Pembayaran Covid-19 di Sumut



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar.
Foto: Agung/Man

Komisi IX DPR RI melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan pembayaran klaim Covid-19 ke seluruh rumah sakit di Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan pihaknya hendak mengkonfirmasi hal tersebut dengan sejumlah pihak terkait di Sumut.

"Kami datang ke Sumut ini untuk melihat dan mengawasi *dispute* (sengketa) klaim RS terhadap pembiayaan pasien Covid-19. Mana

yang belum teratasi akan kami bawa rapat untuk dibahas Komisi IX," terang Ansory di Kantor Dinas Kesehatan Sumut, Medan, Selasa (16/11).

Sebelumnya, persoalan *dispute* klaim tersebut diperoleh saat RDP Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) beberapa bulan yang lalu.

Oleh karena isu tersebut, Ansory mengatakan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan itu. "Meningkat pada saat itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang dikemukakan, antara lain *dispute* yang disebabkan kendala administratif," jelas Ansory. ■ ah/sf



Komisi X Apresiasi Program MBKM Tingkatkan Mutu Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi

program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mampu meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Program MBKM merupakan kebijakan Mendikbudristek yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

“Program MBKM ini luar biasa bagus, kita semakin menjadi paham dan semakin tahu dengan detil bahwa kebijakan dari Kemendikbudristek ini bagus, dari mulai niatnya, tujuannya,

dan bagus juga untuk mahasiswa serta Perguruan Tinggi,” jelas Agustina usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja MBKM Komisi X DPR RI ke Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/11).

Dirinya melihat, program MBKM ini memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk menghadapi dunia luar. Namun di sisi lain, ia menyoroti pentingnya dilakukan sosialisasi yang masif terhadap program MBKM, agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta didik.

“Tentu regulasi yang disiapkan harus sangat teknis karena ini berkaitan antara perguruan tinggi, mahasiswa, akademisi, dan juga penyelenggara pendidikan. Nah ini ke depan harus diselesaikan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Tiara/Man

dan saya kira dari Kemendikbudristek sudah luar biasa menerima seluruh masukan yang ada dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segala sesuatunya bisa disesuaikan dengan baik, guna memaksimalkan fungsi dari MBKM,” optimis Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut. ■ tra/es

Evaluasi MBKM, Komisi X Serap Aspirasi Kampus

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, beberapa perguruan tinggi menyambut baik program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MKBM). Karena, dengan adanya program tersebut akan membuat dunia pendidikan serta SDM Indonesia lebih memiliki daya saing.

Namun, Hetifah tak menampik bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal dalam program MKBM yang harus dibenahi agar tujuannya

dalam meningkatkan kemampuan SDM Indonesia benar-benar terwujud.

“Kami dari Komisi X DPR sangat senang sekali karena mendapatkan suatu informasi terkait dinamika dan juga saran-saran untuk pelaksanaan MBKM ini,” ujar Hetifah saat memimpin Tim Kunspek Panja MBKM Komisi X DPR RI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Jumat (12/11).

Hetifah mencontohkan, salah satunya ketika perguruan tinggi swasta memastikan bobot 20 SKS untuk belajar di luar program studinya, pertanyaan

yang akan muncul adalah bagaimana cara pengaturannya dan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki perguruan tinggi.

“Banyak sebetulnya hal yang telah kami gali, hasil dari sini akan kami olah menjadi satu rekomendasi dan saya meyakini Kemendikbudristek akan mengakomodir masukan ini agar MBKM ini lebih efektif,” tutur politisi Partai Golkar tersebut. ■ jk/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Jaka/Man



RUU HKPD Wujudkan Pemerataan Layanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) dirancang untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien, melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

"Bahwa undang-undang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola APBD-nya. Kemudian juga kualitas APBD untuk meningkatkan pembangunan di daerah agar semakin lebih baik. Jadi tujuannya adalah meningkatkan efektivitas APBD bagi kesejahteraan rakyat," pungkask saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/11). Dalam kunjungan ini, Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi RUU HKPD dari kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung.

Politisi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, RUU HKPD ini juga dimaksudkan untuk mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dolfie menegaskan, nantinya RUU HKPD ini menjadi formula dalam menggali potensi sumber daya masing-masing daerah, agar dibagikan secara adil dan selaras.

"Usahnya adalah supaya kondisi di kabupaten/kota Indonesia ini dapat

terbagi menjadi daerah penghasil dan non-penghasil, kemudian juga daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil. Nantinya, bagaimana kita bisa menciptakan formula agar daerah penghasil juga bisa berkontribusi untuk daerah non penghasil. Hal ini dikarenakan jika daerah penghasil hanya menikmati sendiri dan daerah non penghasil tidak memiliki penghasilan yang lain, maka kesenjangan akan semakin tinggi," tegas legislator dapil Jawa Tengah IV itu. ■ dip/sf

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP. Foto: Dipa/Man



Siklus Belanja Daerah Perlu Perbaikan

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, siklus belanja daerah yang ada saat ini perlu dilakukan perbaikan karena memiliki beberapa kelemahan. Hal ini juga akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

"Yang utama di sini adalah mengatur bagaimana kualitas belanja. *Quality spending* ini harus menjadi sebuah langkah-langkah yang disiapkan karena formulasinya akan berbeda nanti ke depan di dalam UU HKPD," ujar Misbakhun usai mengikuti tim kunspek Komisi XI DPR RI dalam rangka serap aspirasi untuk RUU HKPD di Malang, Jawa Timur, Senin (15/11).

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, Komisi XI akan membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan akses keuangan dari APBN. "Kita sebagai pembina yang juga akan

Komisi XI Serap Aspirasi RUU HKPD di Sumut

Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna penyempurnaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD). Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengaku dalam kesempatan ini pihaknya mendapatkan masukan yang sangat bagus dan konstruktif.

“Karena mereka menyampaikan aspirasi, dan ekspektasi. Karena itu kami juga berharap agar Undang-Undang itu (RUU HKPD) betul-betul selain mencapai tujuan meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran, efisiensi, disiplin fiskal, juga mensejahterakan masyarakat. Khususnya masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ujar Hendrawan usai pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut dan perwakilan Kepala Daerah se-Sumut, di Medan, Sumut, Senin (15/11).



Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto: Hanum/Man

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menjelaskan, pembahasan RUU HKPD sudah masuk ke dalam Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). “Ya tetapi karena memang Undang-Undang ini mewarnai postur Indonesia masa depan, karena ini betul-betul diatribusi oleh Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, itu sebabnya harus hati-hati. Jangan sampai ada hal-hal yang luput dari masukan yang kita abaikan,” terang Hendrawan lebih lanjut.

RUU HKPD dimaksudkan untuk mencapai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar potensi sumber daya masing-masing daerah dapat dibagi secara adil dan selaras. “Dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dinyatakan bahwa dukungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah itu harus adil dan selaras. Nah mengoperasionalkan adil dan selaras inilah yang harus betul-betul dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang (HKPD) ini,” jelas Hendrawan. ■ hnm/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Aisyah/Man

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendapatkan akses keuangan dari APBN, agar APBN benar-benar memperhatikan tentang kemampuan belanja daerah dan potensi-potensi penerimaan di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengatakan, ketimpangan finansial antar daerah didasari oleh kemandirian fiskal dan kualitas SDM. Hal ini akan dibenahi dengan RUU HKBP agar ketimpangan semakin mengecil.

“Diharapkan, memang HKPD ini bisa lebih memperkecil ketergantungan daerah kepada pusat dan kemudian selain kemandirian juga kesetaraan

(equal) pemerataan (fairness),” pungkas Indah lebih lanjut. ■ ais/es



**QUALITY SPENDING
INI HARUS MENJADI
SEBUAH LANGKAH-
LANGKAH YANG
DISIAPKAN KARENA
FORMULASINYA
AKAN BERBEDA
NANTI KE DEPAN DI
DALAM UU HKPD**

Baleg Serap Aspirasi RUU PT TUN Mataram



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam (tengah). Foto: Kiki/Man

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)

DPR RI Ibnu Multazam memandang, cakupan wilayah hukum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya sudah terlalu luas. Untuk itu pembangunan kantor PT TUN Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu solusi mewujudkan akses keadilan keadilan (*access to justice*) dan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat setempat.

Baleg DPR Targetkan **Pembentukan PT TUN Baru dalam 4 Tahun**

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan Mahkamah Agung, dipandang perlu dibentuk PT TUN yang baru untuk menambah kapasitas pengadilan tinggi yang sudah terbentuk sebelumnya. Diketahui saat ini baru ada empat PT TUN yaitu PT TUN Medan, PT TUN Jakarta, PT TUN Makassar, dan PT TUN Surabaya. Direncanakan, pembentukan PT TUN di Kalimantan nantinya akan berpusat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggota Baleg DPR RI Adang

Daradjatun mengakui, di tengah pandemi Covid-19 banyak kendala dan tantangan yang dihadapi untuk membentuk PT TUN baru.

“Seperti yang kita rapatkan di DPR, khususnya di Baleg DPR RI, urgensi pembentukan pengadilan tinggi agama dan sebagainya, sangat penting sekali. Mendengar paparan langsung dari para pelaku di lapangan, Ketua Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa situasi sekarang itu jelas sulit,” tutur Adang saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Kalsel, Kamis (11/11).

Adang menjelaskan, luasnya daerah hukum setiap PT TUN, turut menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya



Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Dipa/Man

transportasi yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan. Dari sisi manajemen, jauhnya jarak pengadilan

“Saya menilai PT TUN Surabaya yang saat ini daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlalu luas dan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan kasus hukum,” ucap Ibnu saat memimpin pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, NTB, Kamis (11/11)

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pembangunan rumah dinas untuk Hakim di setiap daerah merupakan usulan yang sangat baik. Mengingat masa jabatan hakim masa pensiunnya adalah 65 tahun ditambah lagi ketika bertugas di daerah tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Karena banyak hakim pengadilan tinggi yang meninggal dan lain sebagainya karena jauh dengan keluarga, aspirasi itu adalah sangat baik dan itu akan kita sampaikan ke Mahkamah Agung untuk melaksanakan aspirasi itu,” tukas Ibnu. ■ qq/es

tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama, mengakibatkan rentang kendali yang tidak efektif. Selain itu, penambahan volume perkara yang cenderung meningkat, menjadi alasan yang mendesak untuk membentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru.

“Salah satu contohnya, perkara di (Kalsel) sini masalah tanah 100 meter, tetapi disidangkannya di Jakarta. Maka yang bersangkutan memerlukan biaya yang besar, sedangkan yang kita tahu bahwa prinsip hukum itu harus sederhana, murah dan segera. Jadi, dalam hal ini esensi daripada pembentukan RUU ini, kita ingin masyarakat ingin mendapatkan pelayanan hukum yang baik dengan membangun pengadilan-pengadilan tinggi di beberapa wilayah,” pungkask politisi PKS itu. ■ dip/sf

Baleg DPR Komitmen Pastikan Pemprov Kepri Bentuk Pengadilan Tinggi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan Baleg berkomitmen untuk memastikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) segera mewujudkan pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah tersebut. Firman menuturkan, hal tersebut merupakan bentuk komitmen DPR untuk mewujudkan penyeteraan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan Firman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran Forkopimda Kepri, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, perwakilan Mahkamah Agung RI, perwakilan Kemenkumham, perwakilan Kemenkeu, Kapolda Provinsi Kepri serta perwakilan TNI, di Tanjungpinang, Kepri, Kamis (11/11).

“Baleg DPR RI mendorong semoga apa yang dicita-citakan bersama untuk membentuk pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama di Provinsi Kepri dapat direalisasikan secepatnya agar penegakan hukum dapat

dilaksanakan seadil-adilnya agar masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan dalam hukum,” ujar Firman, optimis.

Politisi Partai Golkar tersebut mengapresiasi komitmen Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk segera mendirikan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri. Di antaranya, Gubernur Kepri pada saat akhir pertemuan tersebut menghibahkan lahan sebagai wujud daya dukung pembangunan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri. ■ pun/sf

Anggota Badan Legislasi DPR RI
Firman Soebagyo. Foto: Puntho/Man



BKSAP: Semua Negara Punya Semangat Sama Hadapi Pandemi Covid-19

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus

memastikan seluruh delegasi dari Asia dan Eropa pada Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-11 mempunyai semangat yang sama dalam menyelesaikan wabah Covid-19. Dimana virus tersebut memberikan dampak yang sangat luas kepada banyak negara hingga beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, selain menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diharapkan tercapai pada 2030.

Demikian dikatakan Sihar usai mengikuti Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-11 dengan tema “Memperkuat Kemitraan Parlemen untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Era Covid-19” secara virtual dari Jakarta, Selasa (16/11). Sihar menambahkan, tentunya dalam situasi wabah Covid-19, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menekan angka penyebaran dari virus tersebut. Belum juga harus memikirkan anggaran untuk implementasi SDGs.

“Dengan demikian kita harus benar-benar bekerja sama dengan baik dengan negara-negara lain dalam penanganan virus Covid-19. Dimana, dalam pemberian vaksinasi harus mendapatkan porsi atau pendistribusian yang sama, sehingga diharapkan semua negara-negara yang terdampak bisa keluar dari Covid-19



Delegasi BKSAP DPR RI saat mengikuti Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-11. Foto: Runi/rvl

secara berbarengan. Walaupun ada (vaksinasi) yang lebih cepat, kita tidak terlalu tertinggal jauh dari negara lain,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut Sihar mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang dihadapkan dengan dua insiden berjangka panjang, yaitu Covid-19 yang efeknya akan dirasakan dalam jangka berapa tahu ke depan, kemudian secara bersamaan Indonesia juga harus menyelesaikan SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030 mendatang.

“Untuk itu, salah satu poin yang kita sampaikan kepada delegasi-delegasi bahwa perdamaian itu sangatlah penting dengan adanya perdamaian akan membawa stabilitas. Dan ini akan menjadi kunci karena dapat memberikan waktu bagi kita guna menyelesaikan persoalan dari pada Covid-19 dan juga SDGs,” jelas Sihar.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut memaparkan, perdamaian adalah fondasi penting dari pembangunan. Perdamaian menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang atau meningkat. Dengan adanya perdamaian, Sihar yakin struktur pendidikan dan kesehatan bisa berkembang.

Sistem dalam menyediakan infrastruktur bisa terakomodir, memiliki waktu untuk berintegrasi, kegiatan perekonomian tumbuh dan perubahan iklim terkendali. Selain itu, perdamaian juga memungkinkan untuk membangun kemajuan sistem kesehatan dalam pencegahan Covid-19. Dengan demikian, perdamaian membawa stabilitas yang merupakan kunci dalam mengatasi tantangan pencapaian SDGs dan pandemi di masa depan. ■ rni/sf



BAKN DPR RI dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati foto bersama sivitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM). Foto: Taufan/Man

Pemerintah Harus Miliki Desain Besar Atasi Masalah Pertanahan

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, pemerintah masih memberikan kepemilikan tanah kepada korporasi, dan tidak memberikan kepemilikan kepada petani, sehingga tidak bisa mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Sementara menurutnya, pemerintah bisa memberikan kepemilikan tanah kepada petani dalam skala kecil-kecil.

“Ketidakmampuan pemerintah mencapai tujuan reforma agraria,

sebagai sebuah kegagalan. Seharusnya pemerintah memiliki desain besar untuk mengatasi masalah-masalah tanah di Indonesia. Efek dari sikap pemerintah ini sangat besar, karena petani-petani kecil tidak bisa mendapatkan haknya untuk memiliki tanah,” tandas Anis saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Universitas Gajah Mada (UGM), DI Yogyakarta, Kamis (11/11).

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyadari, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) oleh sebagian kalangan dianggap

ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun setelah diteliti dengan seksama, Anis menilai UU ini sama sekali tidak ketinggalan zaman.

“Justru harus diperkuat, karena UU ini merupakan jiwa bagi persoalan agraria di tanah air, jika persoalan tanah hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi, maka konflik kesenjangan kepemilikan tanah tidak akan berakhir,” kilah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

“Perbedaan cara pandang tentang sumber daya alam, yaitu kepemilikan tanah antara masyarakat umum dengan pemilik modal, menjadi akar masalah. Jika cara pandang ini dibiarkan sendirisendiri, maka petani dan pemilik modal akan selalu berhadapan. Ini yang menyebabkan reforma agraria tidak bisa mencapai titik temu,” ujarnya. ■ tn/sf

”

KETIDAKMAMPUAN PEMERINTAH MENCAPAI TUJUAN REFORMA AGRARIA, SEBAGAI SEBUAH KEGAGALAN

Layanan RS Siloam Denpasar Sudah Sesuai Harapan

Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin Wakil Ketua BURT Evita Nursanty menggelar pertemuan dengan direksi dan jajaran Rumah Sakit Siloam Denpasar yang merupakan RS *provider* PT Asuransi Jasindo dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Hari ini BURT DPR RI bertemu dengan direksi dan jajaran Rumah Sakit Siloam Denpasar. Dan dari materi diskusi pertemuan yang kita lakukan, pelayanan Rumah Sakit Siloam kepada Anggota DPR maupun keluarganya sudah sesuai seperti yang diharapkan dari rumah sakit *provider* Jamkestama,” tutur Evita di Denpasar, Bali, Jumat (12/11).

Evita menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan RS Siloam sudah cukup bagus. “Saya sudah keliling beberapa Rumah Sakit Siloam yang ada, dan memang mereka memiliki standar pelayanan,

”

SAYA SUDAH KELILING BEBERAPA RUMAH SAKIT SILOAM YANG ADA, DAN MEMANG MEREKA MEMILIKI STANDAR PELAYANAN, BAIK SILOAM DI IBU KOTA MAUPUN DI KABUPATEN YANG KITA KUNJUNGI.

baik Siloam di ibu kota maupun di kabupaten yang kita kunjungi, fasilitasnya memang *is a hospital group*. Grup RS Siloam mempunyai standar layanan dan umumnya itu sama di semua RS Siloam yang ada,” terang Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyatakan, RS Siloam layak dan direkomendasikan untuk dijadikan rumah sakit rujukan apabila ada Anggota DPR maupun keluarganya yang memerlukan perawatan fasilitas kesehatan. “Harapan ke depan yakni menyangkut soal komunikasi. Meski bukan terjadi di Siloam Bali, namun masih ada beberapa rumah sakit yang disampaikan oleh Anggota DPR bahwa ada obat yang ditanggung asuransi dan ada obat yang tidak ditanggung oleh asuransi,” jelasnya ■ dep/es



Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty bertukar cenderamata usai pertemuan dengan direksi dan jajaran Rumah Sakit Siloam Denpasar. Foto: Devi/Man



Wakil Ketua BURT DPR RI H. A. Bakri HM saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT ke Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Foto: Jaka/Man

Layanan Joumpa Airport VIP Service Bengkulu Cukup Baik

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI H. A. Bakri HM menilai, pelayanan Joumpa Airport VIP Service di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu terhadap Anggota Dewan sudah cukup baik. Namun, ia mengimbau agar layanan protokol tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum, terutama kepada orang yang sakit serta para lansia (lanjut usia) yang memerlukan perhatian lebih dari petugas.

“Kami sudah menyampaikan kepada Joumpa dan protokol bandara untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka (masyarakat umum), sehingga mereka merasa keberadaan protokol yang melayani Anggota Dewan bisa

dirasakan untuk masyarakat umum,” ujar Bakri saat memimpin Tim Kunker BURT dalam rangka pengawasan terhadap layanan Joumpa Airport VIP Service dan Lounge di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Senin (15/11).

Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan, ada perkembangan kenaikan penumpang di Bandara Fatmawati Soekarno yang cukup baik setelah menurunnya angka penularan pandemi. “Alhamdulillah penumpang (pesawat) sekarang sudah mulai ramai dan ekonomi di sini juga sudah mulai bangkit. Kami mengimbau supaya protokoler terhadap protokol Covid-19 tetap dijalankan, bagaimanapun juga kita harus waspada mengantisipasi gelombang berikutnya,” imbau Bakri.

Pada kesempatan yang sama, Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan, pihaknya meminta agar Joumpa Airport VIP Service Bengkulu juga harus komunikatif dan proaktif kepada Anggota Dewan. Karena memang tugas kedewanan kan banyak sekali, terkadang agenda yang sudah terjadwal, satu jam sebelumnya bisa batal karena ada tugas lain.

“Untuk itu, memang dibutuhkan kerja sama yang harmonis dan komunikatif terutama terhadap Anggota Dewan di daerah pemilihan ini, artinya pihak Joumpa juga jemput bola. Saya juga berharap, ke depan layanan protokoler ini terus ditingkatkan menjadi lebih baik, agar tugas-tugas kenegaraan bisa berjalan dengan baik dan aman,” ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI ini. ■jk/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberi sambutan pada *Focus Group Discussion* (FGD) Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bertajuk "Konvergensi Media Internal DPR RI, Sinergi Mewujudkan Parlemen Modern" di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/11). Foto: Oji/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berfoto bersama usai menandatangani MoU tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pendirian Asosiasi *Certified Mitigation in Procurement* antara Setjen DPR RI dengan enam lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11). Foto: Novel/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Indra Pahlevi sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen yang baru dan dua Pejabat Eselon IV, serta enam Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin (15/11). Foto: Andri/Man

